MAKALAH
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
“ ASAS-ASAS HUKUM ACARA PADA UMUMNYA”

Disusun Oleh :

LIS NOVI ANDRIANZA

Lisnoviandrianza20@gmail.com

1910003600223

3H5

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS EKASAKTI
PADANG
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Makalah ini guna melengkapi tugas Ilmu Negara yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Bapak Laurensius Arliman S, SE., SH., M.Kn di Universitas Ekasakti Padang dengan judul **“ASAS-ASAS HUKUM ACARA PADA UMUMNYA”**.

Shalawat dan salam, semoga dilimpahkan Allah kepada ruh Nabi Muhammad SAW. Yang telah merubah keadaan manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tujuan pembuatan makalah ini seperti sudah Penulis sebutkan diatas adalah untuk menyelesaikan Tugas Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN). Di samping itu juga dapat bermanfaat untuk para pembaca guna mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang asas-asas hukum acara pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih ada kekurangan-kekurangan dari segi kualitas maupun ilmu Pengetahuan yang Penulis kuasai. Oleh karna itu, Penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan pembuatan makalah dimasa mendatang. Penulis berharap agar makalah ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca terutama bagi saya sendiri sebagai Penulis.

Padang, 03 Februari 2021

PENULIS

LIS NOVI ANDRIANZA

1910003600223

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan 2

BAB II PEMBAHASAN..... 3

2.1 Hukum Acara Perdata..... 3

2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata..... 3

2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata 4

2.2 Hukum Acara Pidana..... 7

2.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana..... 7

2.2.2 Asas Hukum Acara Pidana 8

BAB III PENUTUP 13

3.1 Kesimpulan 13

3.2 Saran..... 15

DAFTAR PUSTAKA 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.

Berbicara mengenai praktek peradilan perdata di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan normatif yang mengaturnya. Hal ini diperlukan agar semua pihak yang terlibat di dalam suatu sistem peradilan dapat memperoleh panduan untuk menjalankan proses persidangan yang dihadapi. Di Indonesia, mekanisme tentang praktek peradilan perdata terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berfungsi untuk menegakkan aturan hukum material dan Hukum Acara Pidana adalah *hukum formil* yang menjalankan hukum materil dari Hukum Pidana itu sendiri. Karena itu kita harus mengerti betul tentang hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang didalamnya terkandung esensi praktek peradilan perdata dan pidana. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis

akan membahas tentang asas-asas yang berlaku pada hukum acara perdata dan hukum acara pidana di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah adalah : Apa sajakah asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana di Indonesia ?

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan pembahasan makalah ini adalah untuk mengetahui asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 HUKUM ACARA PERDATA

Hukum material di negara kita, baik yang termuat dalam suatu bentuk perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, merupakan pedoman atau pegangan ataupun penuntun bagi seluruh warga masyarakat dalam segala tingkah lakunya di dalam pergaulan hidup. Semua ketentuan-ketentuan tersebut tidaklah cukup hanya untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk ditaati dan dilaksanakan.

Oleh karena itulah maka dalam hal ini diperlukan sekali suatu bentuk perundang-undangan yang akan mengatur dan menetapkan tentang cara bagaimanakah melaksanakan hukum materiil ini. Sebab tanpa adanya aturan tersebut, maka hukum materiil ini hanya merupakan rangkaian kata-kata saja, tapi tidak dapat dinikmati oleh warga masyarakat. Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menerapkan hukum materiil ini, dalam istilah hukum sehari-hari dikenal dengan sebutan Hukum Formal atau Hukum Acara.

2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., “Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim”.

Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S. H., “Hukum Acara Perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.

Menurut Prof. Dr. Supomo, S.H., “Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain.

2.1.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata

Untuk mengetahui hakikat hukum acara perdata, kiranya perlu diketahui asas-asasnya seperti berikut:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Diselenggarakannya proses acara perdata (peradilan perdata) tergantung pada mereka yang berkepentingan. Inisiatif datang dari masyarakat, khususnya yang berkepentingan. Dengan demikian,

proses peradilan perdata terjadi bila ada permintaan dari seseorang atau sekelompok orang yang menuntut haknya. Jadi hakim menunggu datangnya permintaan atau tuntutan atau gugatan dari masyarakat.

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim, dalam memeriksa perkara perdata, bersifat pasif. Artinya bahwa luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan (Pasal 5 UU No. 14/1970). Bila yang bersengketa mencabut gugatannya karena telah tercapai penyelesaian melalui perdamaian, hakim tidak akan menghalangi (Pasal 130 HIR, 154Rbg). Hakim hanya dibenarkan untuk memutuskan apa yang diminta oleh para pihak (Pasal 178 ayat(2) dan 3 HIR, 189 ayat(2) dan (3) Rbg).

3. Persidangan Bersifat Terbuka

Pada dasarnya, proses peradilan dalam persidangan terbuka untuk umum, setiap orang boleh menghadiri persidangan asal tidak mengganggu jalannya persidangan dan selalu menjaga ketertiban. Asas ini bertujuan untuk agar persidangan berjalan secara fair, objektif, dan hak-hak asasi manusia pun terlindungi. Persidangan dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam keadaan tertutup apabila ada

alasan-alasan yang penting atau karena ketentuan undang-undang bahwa sidang dapat dilaksanakan tertutup.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak yang bersengketa harus didengar, diperhatikan, dan diperlakukan sama (Pasal 5 (1) UU No. 14/1970). Proses peradilan dalam acara perdata wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, sebelum pihak lain memberikan pendapatnya.

5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadili. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai-nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkan.

6. Beracara Dikenakan Biaya

Berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 4 (2), UU No. 14/1970). Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk

panggilan, pemberitahuan untuk para pihak serta biaya materai. Mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo).

7. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan diri pada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Dengan memeriksa secara langsung terhadap para pihak hakim dapat mengetahui lebih jelas pokok persoalannya. Tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya bila dikehendakinya (Pasal 123 HIR, Pasal 147 Rbg).

2.2 HUKUM ACARA PIDANA

2.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana

Apa itu Hukum Acara Pidana? Untuk menjawabnya mari kita pahami pengertiannya menurut beberapa ahli berikut ini :

Menurut R.Soesilo

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan huku pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana putusan itu harus dilakukan.

Menurut Prof.Mulyatno

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.

Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro

Hukum acara pidana adalah sederat aturan yang memuat peraturan dan tata cara bagaimana badan-badan pemerintahan berkuasa, seperti pihak polisi, kejaksaan, dan pengadilan wajib mengadakan tindak hukum pidana sebagai tujuan negara.

Maka dapat disimpulkan Hukum Acara Pidana adalah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan Negara.

2.2.2 Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Dalam menjalankan Hukum acara Pidana tadi, tentunya ada *asas-asas* yang berlaku, yakni antara lain:

1. Asas Legalitas

Legalitas sendiri berasal dari bahasa latin yakni *legal* yang artinya sah menurut undang-undang.

Didalam KUHP, pasal 1 ayat (1) tertulis "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Dikarenakan hukum harus berlandaskan asas legalitas, maka semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan *ketentuan hukum dan undang-undang* yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diluar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang.

2. Asas Perlakuan Yang Sama di Muka Hukum

Istilah lainnya adalah *Equality Before The Law*. Asas ini didukung oleh UU Kekuasaan Kehakiman, yakni pasal 4 ayat (1) UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Jadi setiap orang itu diperlakukan secara sama-rata, tidak ada istilah karena dia pejabat tinggi negara jadi lebih diistimewakan, begitu juga sebaliknya. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Dikenal juga dengan istilah *Presumption of innocence*. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan, wajib dianggap *tidak bersalah* sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Intinya adalah peradilan itu berjalan tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Asas ini juga didukung dalam pasal 50 KUHAP, yang berisi "ayat (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, ayat (2) Tersangka berhak perkaranya *segera* dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (3) Terdakwa berhak *segera* diadili oleh pengadilan". Kata "segera" diatas menyatakan harus dilakukan dengan cepat.

Selain itu, dalam pasal 67 KUHAP juga tertulis "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

Hal ini juga menyiratkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut.

5. Asas Oportunitas

Asas ini memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan suatu tindak pidana demi kepentingan umum. Jadi seorang jaksa boleh tidak menuntut seseorang atau badan hukum walaupun sudah jelas dan didukung alat-alat bukti, namun dengan syarat menyangkut *kepentingan umum* .

6. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Dengan adanya asas ini, diharapkan adanya keterbukaan dalam sidang pengadilan. Namun tidak semua kasus dapat disidangkan secara terbuka untuk umum. Terkhusus untuk kasus *kesusilaan dan anak-anak sebagai terdakwa* sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

7. Asas Akusator

Yakni asas yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai *subjek* dalam setiap tindakan pemeriksaan. Terdakwa punya hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, namun hakim tetap berada diatas keduanya.

8. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Tersangka ataupun terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 69-74 KUHAP. Misalnya isi dari pasal 69 KUHAP : Penasehat hukum berjak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

9. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

Seorang tersangka ataupun terdakwa berhak mendapat ganti rugi apabila ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili namun tanpa asalan yang jelas, dan juga mendapatkan rehabilitasi apabila diputus bebas atau lepas.

Hal Ganti Rugi dapat dilihat dalam pasal 95 KUHAP yang berisi :
"Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan"

10. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya Tetap

Dalam asas ini dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim yang mana jabatannya bersifat tetap. Hakim telah diangkat oleh kepala Negara secara tetap.

11. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Dalam acara pemeriksaan di pengadilan, pemeriksaan dilakukan langsung oleh hakim kepada terdakwa dan saksi. Secara lisan artinya hakim memeriksa secara langsung bukan melalui tulisan.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Hukum acara perdata meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain.

Asas-asas hukum acara perdata meliputi :

- a. Hakim Bersifat Menunggu; Hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*judex ne procedat ex officio*).
- b. Hakim Bersifat Pasif; Artinya bahwa luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim.
- c. Persidangan Bersifat Terbuka; Proses peradilan dalam persidangan terbuka untuk umum, setiap orang boleh menghadiri persidangan asal tidak mengganggu jalannya persidangan dan selalu menjaga ketertiban.
- d. Mendengar Kedua Belah Pihak; Kedua belah pihak yang bersengketa harus didengar, diperhatikan, dan diperlakukan sama.
- e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan; Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadili.
- f. Beracara Dikenakan Biaya; Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan untuk para pihak serta biaya materai.

- g. Tidak Ada Keharusan Mewakikan; HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan diri pada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan.

Hukum Acara Pidana adalah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan Negara.

Asas-asas hukum acara pidana meliputi :

1. Asas Legalitas

Legalitas sendiri berasal dari bahasa latin yakni *legal* yang artinya sah menurut undang-undang.

2. Asas Perlakuan Yang Sama di Muka Hukum

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan, wajib dianggap *tidak bersalah* sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Intinya adalah peradilan itu berjalan tidak bertele-tele dan berbelit-belit.

5. Asas Oportunitas

Asas ini memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan suatu tindak pidana demi kepentingan umum.

6. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Dengan adanya asas ini, diharapkan adanya keterbukaan dalam sidang pengadilan.

7. Asas Akusator

Yakni asas yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai *subjek* dalam setiap tindakan pemeriksaan.

8. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

9. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

10. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya Tetap

Dalam asas ini dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim yang mana jabatannya bersifat tetap.

11. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

3.1 SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut, saya menyarankan agar pembaca lebih memahami tentang Asas-Asas Hukum Acara baik secara Perdata maupun Pidana agar pembaca lebih mengetahui serta dapat menerapkan asas-asas tersebut dalam hukum beracara sehari-hari.

Semoga makalah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Saya mohon maaf apabila dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.